

Arab Spring dan Transformasi Ruang Publik Digital di Dunia Arab

Pahrul R^{*}, Ulfa Kurnia²

¹ Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

² Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Article History

Submitted date:

2021-02-15

Accepted date:

2021-04-20

Published date:

2021-11-30 (by
editor)

Keywords:

*Arab Spring, Social
Media, Political
Revolution.*

Abstract

This paper aims to analyze several parts, namely the first part will explain the factors causing The Arab Spring. In the second part, this paper will provide an explanation of the Arab media before and after the uprising. Meanwhile, the third part will review the formation of a “public space” that allows political change in the Middle East through social media. The people of the Arab world believe that the ideal life is the establishment of a democratic political system. Therefore, democratization becomes an inseparable part of The Arab Spring. The spirit of mass movements in Tunisia and Egypt also spread to other Middle Eastern countries. The keywords in this dissemination are transnational activism and digital technology in the context of the public sphere. Transnational activism takes the form of constant reports from the media about what has been going on for months in Tunisia and Egypt. In the case of the revolution in the Middle East, there is an interesting phenomenon, namely that technology is starting to play an important role and people, especially the younger generation, are getting smarter in using technology.

Abstrak

Kata Kunci:

Arab Spring, Media
Sosial, Revolusi
Politik.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis beberapa bagian yaitu bagian pertama akan menjelaskan faktor penyebab The Arab Spring. Di bagian kedua, tulisan ini akan memberikan paparan mengenai media Arab sebelum dan sesudah pemberontakan. Sementara itu, bagian ketiga akan mengulas pembentukan “ruang publik” yang memungkinkan terjadinya perubahan politik di Timur Tengah melalui media sosial. Masyarakat dunia Arab meyakini bahwa kehidupan yang ideal itu adalah dengan terbangunnya sistem politik yang demokratis. Maka dari itu, demokratisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari The Arab Spring. Semangat gerakan massa di Tunisia dan Mesir pun menyebar ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Kata kunci dalam penyebaran tersebut adalah aktivisme transnasional dan teknologi digital dalam konteks ruang publik. Aktivisme transnasional mengambil bentuk laporan yang terus-menerus dari berbagai media mengenai apa yang tengah terjadi selama berbulan-bulan di Tunisia dan Mesir. Dalam kasus revolusi di Timur Tengah ini terdapat suatu fenomena menarik, yaitu bahwa teknologi mulai memegang peranan penting dan rakyat, khususnya generasi muda, semakin pandai dalam memanfaatkan teknologi.

1 Introduction/Pendahuluan

“The Arab Spring”, Musim Semi Arab, adalah bahasa politik yang mulai populer dalam kancah politik internasional, terutama di negara-negara Arab, sejak awal Januari 2011 lalu. Istilah yang menunjukkan kejatuhan berderet rezim pemimpin-pemimpin otoriter dunia Arab, dimulai dari Tunisia, Zein Al- Abidin Ben Ali (Ben Ali), diikuti Mesir dengan tergulingnya Hosni Mubarak, kemudian ke Libya, yang berhasil mengakhiri era kediktatoran Moammar Khadafy yang sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun lamanya, dilanjutkan oleh Yaman, Bahrain, dan Suriah.

* Corresponding author:
Fakhrelnejab@gmail.com

The Arab Spring yang menjadi awal kebangkitan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan lebih demokratis di kawasan Timur Tengah, terutama dunia Arab, justru menampilkan wajah yang lebih menyeramkan. Musim Semi itu telah mengorbankan lebih dari 250.000 orang di Suriah, karena konflik yang terus berkepanjangan. Menurut Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), lebih dari 7,6 juta warga Suriah menjadi pengungsi di negara mereka sendiri dan 4,2 juta mengungsi ke sejumlah negara di sekitar Suriah. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyebutkan, 893.970 orang di antaranya mengalir ke Eropa.

Rakyat Arab menyebut peristiwa politik penting ini dengan sebutan al-Tsaurat al-Arabiyyah yaitu revolusi yang akan mengubah tatanan menuju masyarakat dan bangsa ideal setelah sekian lama dipimpin dengan sistem otoriter, dengan kekuasaan yang tidak dibatasi, yang mengekang kebebasan masyarakat serta melahirkan kesenjangan antara elite (penguasa), yang hidup mewah, dengan rakyat yang miskin. Orang Barat menyebutnya dengan Arab Springs (Musim Semi Arab/ al-Rabi' al-Arabiyy) yaitu musim yang menjadi titik awal pertumbuhan demokrasi di negara-negara Arab (Burdah, 2014: 21).

Fenomena gerakan massa di berbagai negara, yang berani menuntut mundur rezim rezim otoriter merupakan fenomena baru di kawasan Timur Tengah. Gerakan massa tersebut mengarah ke gelombang demokratisasi yang sebelumnya diduga tidak akan pernah berlangsung dalam konteks Timur Tengah. Mengapa gerakan massa melawan rezim otoriter terjadi dan menyebar di antara negara-negara Timur Tengah?

Perkembangan teknologi media sosial tersebut berjalan beriringan dengan pola aktivisme yang semakin canggih dan ter jejaring, yang menghasilkan sebuah gerakan politik yang simultan di kawasan. Secara teoritis, dengan menggunakan konsep transnational activism yang dikemukakan oleh Snow dan Benford (2000) dan konsep public sphere dari Habermas (2010), teknologi memicu pembentukan “ruang publik politis” yang melampaui negara, bangsa dan memungkinkan pertarungan gagasan politik berlangsung di arena tersebut.

Pembahasan tulisan ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama akan menjelaskan faktor penyebab The Arab Spring . Di bagian kedua, tulisan ini akan memberikan paparan mengenai media Arab sebelum dan sesudah pemberontakan. Sementara itu, bagian ketiga akan mengulas pembentukan “ruang publik” yang memungkinkan terjadinya perubahan politik di Timur Tengah melalui media sosial. Tulisan akan ditutup dengan kesimpulan.

2 Methods/Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya The Arab Spring di negara-negara Arab, khususnya Tunisia, Mesir, dan Suriah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis fenomena sosial, politik, ekonomi, dan media yang melatarbelakangi munculnya gerakan revolusi di kawasan Timur Tengah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai literatur yang membahas The Arab Spring, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen terkait kondisi sosial-politik di Tunisia, Mesir, dan Suriah. Adapun data sekunder diperoleh dari sumber pendukung seperti media elektronik, artikel berita, laporan penelitian, serta referensi lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan faktor penyebab The Arab Spring, peran media massa, media sosial, kondisi sosial ekonomi masyarakat Arab, serta perkembangan gerakan demokratisasi di Timur Tengah.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, reduksi data, yaitu memilih dan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu seperti faktor politik, ekonomi, sosial, peran intelektual, dan media massa. Ketiga, penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil penelitian secara naratif dan sistematis agar mudah dipahami. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh data yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya The Arab Spring di dunia Arab.

3 Findings/Hasil

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya The Arab Spring di Tunisia, Mesir, dan Suriah, ditemukan bahwa gejolak revolusi yang terjadi sejak tahun 2011 dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, intelektual, dan media massa. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk kondisi yang mendorong masyarakat Arab melakukan perlawanan terhadap rezim otoriter.

Pertama, faktor politik menjadi penyebab utama munculnya The Arab Spring. Ketiga negara yang diteliti dipimpin oleh rezim otoriter yang berkuasa dalam waktu yang sangat lama dan tidak memperoleh legitimasi melalui proses demokrasi yang terbuka. Di Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali berkuasa sejak tahun 1987 melalui kudeta tidak berdarah. Di Mesir, Hosni Mubarak memimpin sejak tahun 1981 setelah terbunuhnya Anwar Sadat, sedangkan di Suriah Bashar al-Assad menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, melalui sistem kekuasaan dinasti. Selain itu, rezim di negara-negara tersebut menerapkan sistem politik satu partai yang membatasi kebebasan politik masyarakat dan mempersempit ruang oposisi.

Kedua, faktor sosial dan ekonomi turut memperkuat munculnya gerakan perlawanan masyarakat. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, serta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi pemicu utama ketidakpuasan publik. Meskipun kawasan Timur Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak, distribusi kekayaan hanya berpusat pada elit penguasa dan kelompok yang dekat dengan pemerintah. Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya tingkat buta huruf dan lemahnya akses masyarakat terhadap kesejahteraan ekonomi.

Ketiga, ditemukan adanya peran kelompok intelektual dan gerakan demokrasi yang telah berkembang jauh sebelum pecahnya The Arab Spring. Kelompok oposisi, aktivis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil di Tunisia, Mesir, dan Suriah secara terus-menerus membangun kesadaran publik mengenai pentingnya demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia. Di Tunisia misalnya, kelompok oposisi pernah menyampaikan kritik terbuka terhadap praktik korupsi dan otoritarianisme rezim Ben Ali. Di Suriah muncul gerakan “Damascus Spring” dan “Damascus Declaration” yang menuntut pluralisme politik serta reformasi pemerintahan.

Keempat, media massa dan media sosial menjadi faktor penting dalam mempercepat penyebaran gerakan revolusi. Media transnasional seperti Al Jazeera berperan dalam menyebarkan informasi mengenai demonstrasi dan pelanggaran HAM di negara-negara Arab kepada masyarakat internasional. Selain itu, media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan blog menjadi sarana mobilisasi massa, penyebaran informasi, dan pembentukan opini publik. Revolusi di Mesir misalnya banyak dipengaruhi oleh gerakan daring melalui Facebook dan video-video yang diunggah di YouTube oleh para aktivis muda seperti Asmaa Mahfouz.

Kelima, perkembangan teknologi komunikasi dan meningkatnya penggunaan internet di dunia Arab turut mendukung terbentuknya ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik terhadap pemerintah secara lebih bebas. Media baru tidak hanya menjadi alat

penyebaran informasi, tetapi juga menjadi media komunikasi dua arah yang memperkuat solidaritas sosial dan gerakan perlawanan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa The Arab Spring bukanlah peristiwa yang muncul secara spontan, melainkan akumulasi panjang dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi politik, sosial, ekonomi, dan represi negara yang diperkuat oleh peran intelektual serta perkembangan media massa dan media sosial dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat Arab.

4 Discussion/Pembahasan

Faktor Penyebab The Arab Spring

Sebelum The Arab Spring berkejolak, ketiga negara Arab tersebut (Tunisia, Mesir, dan Suriah) mempunyai beberapa kesamaan kondisi sosial ekonomi dan politik yang mempengaruhi The Arab Spring berkejolak. Pertama, ketiga negara tersebut masing-masing dipimpin oleh pemimpin otoriter yang berkuasa cukup lama serta pemimpin yang meraih kekuasaan dengan tidak melalui proses pemilihan yang demokratis. Di Tunisia, Ben Ali berkuasa sejak tahun 1987 melalui kudeta tidak berdarah. Ben Ali mengkudeta Habib Bourguiba setelah dia diangkat menjadi Perdana Menteri satu bulan sebelumnya. Di Mesir, Hosni Mubarak menjadi Presiden Mesir pada tahun 1981 setelah Anwar Sadat terbunuh, sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Di Suriah, perjalanan Bashar al-Assad untuk menjadi Presiden Suriah karena menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, yang meninggal pada 10 Juni 2000. Jauh sebelum Hafez al-Assad meninggal dunia, Bashar al-Assad sebenarnya sudah dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya yang sudah tua.

Tariq Ramadan menambahkan bahwa rezim kediktatoran di negara-negara Arab sudah cukup lama memperlihatkan dirinya pada dunia sebagai kejahatan yang penting (a necessary evil), sebagai benteng pertahanan melawan kebangkitan gerakan politik Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah secara lebih luas (Barakat: 13).

Kedua, ketiga negara tersebut membangun rezim politik dengan sistem satu partai; di Tunisia, Ben Ali menguasai panggung politik dengan Rassemblement Constitutionnel Democratique (RCD), di Mesir, Mubarak berkuasa bersama dengan partai Hizbul Wathan (HW), di Suriah, al-Assad menguasai panggung politiknya dengan dominasi partai Ba'ath. Ketiga, negara-negara tersebut mempunyai banyak catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta membatasi ruang berekspresi kepada rakyatnya, termasuk dengan tidak adanya kebebasan pers. Keempat, krisis ekonomi dan pengangguran melanda rakyat yang dipimpinnya serta meningkatnya tingkat pengangguran. Hussein A. Hassouna juga mencatat bahwa mayoritas negara-negara Arab adalah negara sedang berkembang yang mana tingkat buta hurufnya sangat tinggi (Hassouna: 50-51). Data pada tahun 2009 menunjukkan bahwa tingkat buta huruf di Tunisia mencapai angka 22,3, Mesir mencapai angka 33,6, dan Suria berada pada angka 16,9 (Ottaway, 2010: 52).

Oleh karena itu, gerakan massa yang berlangsung di negara-negara Arab mempunyai karakteristik yang sama, yaitu protes melawan kondisi sosial dan ekonomi, menolak kediktatoran, dan berjuang melawan korupsi (Ramadan: 7). Nadar Hashemi juga melihatnya demikian. Menurutnya The Arab Spring merupakan kelanjutan dari perjuangan dan pencarian panjang dari dunia Arab yang mayoritas Islam untuk dapat menentukan dirinya sendiri, lepas dari cengkeraman, baik dari luar (asing) maupun dari kekuatan otoritarian internal sendiri (the Arab Spring is the continuation of a longer struggle and quest by the Arab- Islamic world for self-determination from both external and internal authoritarian forces) (Hashemi, 2013: 213).

Kondisi kemiskinan, pengangguran yang dirasakan sejak zaman kolonialisme hingga sekarang masih dialami. Padahal kawasan Timur Tengah memiliki sumber daya alam minyak yang melimpah. Sementara negara-negara tetangga mereka di kawasan Eropa telah menikmati kemakmuran di abad ke-20. Rata-rata pendapatan per kapita rakyat di kawasan Timur Tengah 2 dolar per hari. Kekayaan

alam memang dikelola oleh negara, namun dikuasai oleh segelintir orang yang dekat dengan penguasa, termasuk aset-aset negara yang berupa perusahaan dan badan usaha. Sehingga kekayaan itu hanya menumpuk pada penguasa dan orang-orang yang dekat dengannya (Tamburaka: 13).

Berangkat dari situasi sosial dan ekonomi politik yang terjadi dari ketiga negara tersebut, dapat dikatakan bahwa bergejolaknya The Arab Spring yang masih berlangsung hingga hari ini sebagai puncak dari gunung es akan harapan rakyat untuk hidup dengan kebebasan (demokratis). Hidup dalam tekanan, penderitaan, dan penyiksaan oleh rezim yang sewenang-wenang yang terjadi pada diri Mohammed Bouazizi sebenarnya dirasakan langsung oleh rakyat Tunisia pada umumnya dan rakyat negara-negara Arab secara lebih luas. Oleh karena itu, gejolak The Arab Spring yang menjadi awal untuk mengakhiri rezim otoritarianisme dan bangkitnya ekspektasi publik untuk kehidupan yang demokratis di negara-negara Arab tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh ketiga negara tersebut.

Dalam membaca gerakan perlawanan oleh rakyat negara-negara Arab sejak 2011 lalu, L. Wilardjo memberikan analogi yang cukup menarik bahwa balon yang ditekan terus akhirnya meletus. Demikian pula masyarakat yang ditindas terus oleh penguasa akhirnya tidak tahan lagi, lalu pecahlah perlawanan (Wilardjo, 2014: 6). Teori Ign. Ismanto membenarkan hal tersebut. menurut Ismanto, setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi berakhirnya rezim otoritarian, yaitu 1. Tekanan demokratisasi dari elemen-elemen yang berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi. 2. Krisis ekonomi (Pito, dkk., 2006: 90).

Dalam teori perubahan sosial, The Arab Spring ini merupakan perubahan sosial yang datangnya dari free market (pasar bebas), bukan perubahan yang datang dari negara yang mana kita ketahui bahwa perubahan sosial itu merupakan keniscayaan. Membahas perubahan sosial itu sendiri tidak dapat lepas dari konteks filsafat barat, yaitu suatu pandangan terhadap kemajuan manusia dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh kemajuan masyarakatnya (Salim, 2002: 22).

Berangkat dari pemaparan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor bergejolaknya The Arab Spring sejak awal Januari 2011 lalu karena dua hal. Pertama, kelompok-kelompok intelektual yang bergerak untuk perubahan rezim (untuk demokrasi) sudah lama tumbuh dan terus bergerak untuk membangun kesadaran masyarakat. Selain itu, inisiatif-inisiatif untuk membangun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis di negara-negara Arab sudah dilakukan, baik itu datangnya dari pihak luar (asing) maupun dari internal. Hal itu terlihat bahwa pada tahun 1994, Liga Arab telah menerima Piagam Hak Asasi Manusia/human right charter. Langkah ini merupakan salah satu upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang terbuka (transparan), akuntabel, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Maka dari itu, Nader Hashemi berpandangan bahwa The Arab Spring memungkinkan untuk diistilahkan “Fourth wave of Democratization”, sebagai gelombang keempat demokratisasi (Hashemi, 2013: 207).

Halim Barakat memperkuat pandangan ini dengan mengatakan bahwa demokrasi sebenarnya telah menjadi tuntutan masyarakat Dunia Arab sejak tahun 1990-an. Hal ini juga diperkuat oleh hasil survei yang dirilis oleh Arab Human Development Report (AHDR) pada tahun 2003 yang menunjukkan bahwa 60 persen masyarakat dunia Arab mendukung demokrasi dan 80 persen yang menolak pemerintahan otoriter (Sau, 2004: 4233). Terkait dengan ini, Filipe R. Campante dan Davin Chor menuliskan yang melihat perkembangan cukup pesat dalam hal ekspansi pendidikan di dunia Arab dalam dekade terakhir. Di samping itu, juga terdapat teori yang mengatakan bahwa pendidikan mempengaruhi secara positif perkembangan politik atau demokratisasi dari sebuah negara (Campante dan Davin, 2012: 168). Oleh karena itu, gejolak The Arab Spring sejak 2011 lalu tidak terlepas dari peran kaum intelektual di mana negara-negara Arab juga menunjukkan adanya kemajuan yang cukup pesat dalam ekspansi pendidikan.

Di Tunisia, misalnya, pada tahun 1995 Moadda, kelompok oposisi, mengirim surat terbuka kepada Ben Ali yang memprotes praktik korupsi, otoritarianisme, dan tidak adanya ruang kebebasan dalam berpolitik di Tunisia. Ben Ali, menjelang pemilihan tahun 1994, juga pernah mengatakan bahwa ia akan membangun politik dengan sistem multi-partai di Tunisia. Ia juga mengatakan kepada publik bahwa demokratisasi tidak bisa tercipta dengan proses yang sangat cepat, tetapi harus dengan perlahan-lahan dan proses perubahannya secara terorganisir (Murphy: 215-230). Maka dari itu, Rami G. Khouri berpendapat bahwa The Arab Spring bukanlah ledakan politik yang datang secara tiba-tiba atau spontan, The Arab Spring adalah kelanjutan dari perjuangan yang cukup panjang akan harkat dan hak-hak warga di negara-negara Arab (Laipson and Friends, 2011: 6).

Di Mesir, pada tahun 2000, mulai muncul dalam pembicaraan apa yang disebut infitah-keterbukaan ke arah Barat, perdamaian dengan Israel, dan pengadopsian model kapitalis neoliberal sebagai kunci kesejahteraan bangsa Mesir (Kuncahyono: 89-90). Sementara itu, di Suriah, muncul gerakan yang disebut “Damascus Spring” pada awal pemerintahan Bashar al- Assad. “Damascus Spring” adalah sebuah gerakan pembaharuan yang semula diberi tempat oleh Bashar al-Assad, tetapi tiba-tiba dalam sekejap dilarang dan “Damascus Spring” berubah menjadi “Damascus Winter”. Meski “Damascus Spring” hanya berumur pendek, tetapi benih-benih tumbuhnya kelas menengah yang tercerahkan sudah mulai muncul dan tetap tumbuh walau secara diam-diam. Pada bulan Oktober 2005, sebanyak 250 tokoh oposisi bersama-sama mendeklarasikan apa yang disebut “Damascus Declaration” (Deklarasi Damaskus). Juga ada kelompok gerakan yang menyebut dirinya “Friends of Civil Society,” yang membuat petisi, juga dikenal dengan istilah Manifesto 1000, yang menuntut terciptanya pluralisme politik di Suriah (Ghaddbian, 2001: 636).

Komunitas-komunitas intelektual ini mempunyai pengaruh yang sangat besar sebagai faktor utama dari bergeraknya perlawanan massa terhadap rezim. Komunitas-komunitas intelektual itulah yang membangun kesadaran rakyat untuk melawan rezim yang menindasnya selama berpuluh-puluh tahun. Merekalah yang sudah cukup lama bergerak untuk membangun kesadaran public serta mengambil langkah-langkah inisiatif untuk melakukan perubahan sosial, termasuk dengan inisiatif untuk membangun pranata politik yang demokratis. Peran tokoh intelektual memang tidak bisa dinafikan dalam sebuah gerakan perubahan sebagaimana yang dikatakan oleh Edward Said bahwa tidak ada revolusi penting dalam sejarah modern yang tanpa melibatkan intelektual; sebaliknya, setiap gerakan akbar kontra-revolusi juga selalu melibatkan intelektual. Intelektual telah berperan sebagai ayah dan ibu sebuah gerakan (Said, 2014: 7). Hal itu karena intelektual, menurut paham Said, adalah ‘pencipta sebuah bahasa yang mengatakan yang benar kepada yang berkuasa.’ The Arab Spring yang mulai bergejolak pada awal tahun 2011 lalu tidak terlepas dari peran intelektual tersebut. merekalah yang terus bergerak menggugah kesadaran publik akan penindasan oleh rezim yang berkuasa, baik itu di Tunisia, Mesir, dan Suriah.

Kedua, peran media massa. Peran media, selain peran intelektual, sangatlah besar dalam gejolak The Arab Spring di negara-negara Arab yang berlangsung sejak awal 2011 lalu. Karena media memainkan peran kunci itulah sehingga beberapa pengamat menyebutnya dengan istilah “Internet revolutions” (Ramadan: 45). Media masalah yang berfungsi secara efektif dan masif menyampaikan protes dari rakyat terhadap rezim Ben Ali di Tunisia ke seluruh negara-negara Arab, bahkan dunia.

Pemberitaan media itulah yang membangkitkan kesadaran dan gerakan yang sama di beberapa negara-negara Arab, termasuk di Mesir dan Suriah. Eric Goldstein berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mendorong lahir dan berlangsungnya protes yang berawal di Tunisia, salah satunya adalah proses pemberitaan dari Al Jazeera yang berlangsung terus menerus yang diambil dari hasil peliputan rakyat biasa melalui telepon dan kamera yang kemudian disebar melalui YouTube dan Facebook (Goldstein: 69).

Vitalnya peran media juga terlihat bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, Asmaa Mahfouz, seorang aktivis muda, menyebarkan video lewat Youtube di mana dia berbicara kemenangan rakyat Tunisia melawan rezim Ben Ali di Mesir dan mengajak rakyat Mesir untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh rakyat Tunisia. Asmaa, melalui video rekamannya, juga berjanji untuk mendatangi lapangan Tahrir Square pada tanggal 25 Januari 2011 demi menuntut hak-haknya. Tujuannya adalah memobilisasi rakyat Mesir, di luar afiliasi politik, untuk berdiri melawan kebrutalan polisi, sejumlah tindakan eksekusi, dan perlakuan tidak manusiawi. “If you have honor, dignity, and courage, join me in liberation Square,” katanya dalam video yang diunggahnya (Ramadan: 27- 28). Di samping itu, gerakan untuk mendukung Khalid Said, pemuda Mesir yang meninggal karena penyiksaan oleh intelijen Mesir, juga semakin hari semakin banyak, melalui Facebook, dalam sebuah grup yang bernama Kulluna Khalid Said (Kita Semua Khalid Said) (Syukur: 71).

Memahami vitalnya peran media dalam membangkitkan gerakan perlawanan dari rakyat itulah sehingga pemerintah Mesir, sebelum lengsernya Mubarak, mengambil kebijakan menutup akses layanan internet, telepon, email, dan layanan dunia maya lainnya. Pada minggu pertama Februari 2011, tiga reporter Al-Jazeera juga ditangkap oleh aparat keamanan (Khalil, 2011:88). Langkah politik yang diambil Mubarak, sebelum dipaksa mundur oleh gerakan massa, ini sebagai upaya antisipasi rezim Mubarak dalam membendung gerakan massa yang dimediasi oleh media massa.

Oleh karena itu, keberhasilan masyarakat Mesir mengakhiri kekuasaan Mubarak dapat dikatakan sebagai buah kemenangan media sosial. Aksi jalanan oleh ribuan massa yang mengubah peta perpolitikan di negara-negara Arab tidak dapat dilepaskan dari gerakan yang dirintis melalui dunia maya, termasuk melalui Facebook. Wael Ghonim, tokoh kunci gerakan oposisi Mesir yang juga eksekutif Google, mengatakan bahwa semuanya dimulai dari gerakan online. “Revolusi ini dimulai dari Facebook,” katanya (Gause III, 2011:86).

Media Arab Sebelum Dan Sesudah Pemberontakan

Peran yang dimainkan media Arab setelah pemberontakan hanya dapat dipahami ketika mengingat sejarah beberapa dekade yang lalu. Pada 1970-an dan 1980-an, sebagian besar negara Arab mengembangkan bentuk sensor yang sangat represif dan dominasi negara atas media. Sementara spesifikasi sistem kontrol nasional berbeda, media massa pada umumnya berfungsi sebagai alat untuk mengontrol informasi dan memobilisasi orang untuk mengabdikan pada kekuasaan. Warga negara yang sangat canggih dapat mencari sumber informasi independen, seperti siaran radio VOA atau BBC, tetapi sebagian besar warga terus bergantung terutama pada media nasional.

Ini berubah pada 1990an dan 2000an, ketika siaran satelit gratis Al Jazeera menghancurkan monopoli negara atas informasi dan mengantarkan era televisi Arab transnasional yang kompetitif. Persaingan dari luar negeri memaksa sebagian besar stasiun televisi nasional melakukan modernisasi dan adaptasi. Beberapa negara, seperti Mesir, mengembangkan pers politik yang beragam dan keras kepala. Pada akhir 2000-an, sebagian besar orang Arab memiliki ratusan saluran satelit gratis untuk dipilih, sementara akses Internet hampir ada di mana-mana di kota-kota utama. Perubahan ini mengubah dunia Arab dari lubang hitam informasi menjadi masyarakat yang jenuh media.

Konten media siaran sering beredar melalui media sosial, sementara media sosial menjadi sumber gambar yang penting, video, dan informasi untuk media massa (khususnya konten dari zona konflik seperti Suriah, di mana hanya sedikit jurnalis yang berani melangkah). Media penyiaran, cetak, dan sosial membentuk hubungan simbiosis satu sama lain, sementara media internasional mulai menarik konten dari media sosial Timur Tengah. Di Arab Saudi dan sebagian besar Teluk, Twitter adalah situs utama, sementara di Afrika Utara Facebook lebih banyak digunakan. Televisi menguasai hampir di mana-mana.

Lingkungan informasi Arab memiliki tiga ciri khas dibandingkan dengan daerah lain yang telah mengalami gelombang demokratisasi potensial. Pertama, setiap negara Arab tertanam dalam ekosistem media berbahasa Arab transnasional. Kedua, derajat langsung dan tidak langsung kontrol negara atas media nasional Arab relatif tinggi. Akhirnya, media sosial memperkenalkan dinamika baru yang tidak terlihat dalam transisi demokrasi beberapa dekade lalu. Mari kita pertimbangkan fitur-fitur ini secara bergantian.

1) **Penyiaran Lintas Negara.** Al Jazeera dan bahasa Arab lainnya stasiun televisi transnasional gauge memainkan peran kunci dalam mempublikasikan protes Tunisia awal akhir 2010 dan awal 2011, membingkai mereka untuk audiens berbahasa Arab yang besar sebagai bagian dari cerita Arab yang lebih luas tentang pemberontakan rakyat. Siaran-siaran ini memfasilitasi “pergeseran skala”, ketika perjuangan lokal menjadi terkait bersama dalam karangan narasi umum yang membantu menyebarkan protes dari satu negara ke negara lain. Difusi protes dari Tunisia ke Mesir dan kemudian ke hampir seluruh wilayah sulit dibayangkan tanpa lingkungan media pemersatu ini.

Media transnasional segera merosot menjadi arena perebutan kekuasaan regional, dengan Al Jazeera melayani kepentingan rezim Qatar dan media milik Saudi menyelaraskan diri mereka dengan kebijakan regional Riyadh. Bahrain adalah salah satu titik balik, karena stasiun-stasiun Arab mengabaikan peristiwa dramatis di sana atau mengalihkan liputan mereka tentang pemberontakan rakyat Bahrain dalam istilah sektarian untuk membenarkan intervensi militer yang dipimpin Saudi. Di Libya dan Suriah, sebagian besar stasiun pan-Arab secara terbuka berkampanye untuk kelompok pemberontak terpilih, dan kemudian untuk faksi-faksi tertentu dalam pemberontakan tersebut. Al Jazeera kemudian diidentikkan dengan Ikhwanul Muslimin Mesir dan Ennahda Tunisia, sementara stasiun-stasiun lain menjajakan cerita-cerita sensasional dan liar yang menyulut kemarahan dan kecurigaan anti- Islam.

Pergantian partisan ini, bersama dengan gambaran keruntuhan negara dan kekerasan mengerikan yang datang dari Libya dan Suriah, kemungkinan berkontribusi pada memudarnya antusiasme terhadap pemberontakan rakyat. Keberpihakan juga menghancurkan harapan bahwa media transnasional dapat menyediakan forum netral dimana berbagai narasi media nasional yang bersaing dapat hidup berdampingan dan bahkan mungkin berdialog satu sama lain. Penyiaran transnasional, yang sangat penting untuk menggembelng dan menyebarkan pemberontakan, dengan demikian tidak banyak membantu konsolidasi demokrasi dan pada kenyataannya berkontribusi pada penghancuran transisi.

2) **Media Nasional.** Transisi dari pemerintahan otoriter seharusnya pada prinsipnya memerlukan munculnya ruang publik nasional yang lebih terbuka yang mampu memantau politik domestik dan meminta pertanggungjawaban politisi, mencurahkan perhatian berkelanjutan pada isu-isu lokal, dan menjadi tempat pembentukan opini nasional. Di beberapa negara bagian, hari-hari awal Musim Semi Arab memang menyaksikan munculnya berbagai macam media nasional baru, dari televisi hingga radio hingga surat kabar. Namun, reformasi hukum dan kelembagaan yang terpotong dan polarisasi yang meningkat dengan cepat segera menghancurkan bunga-bunga muda. Dengan meruntuhkan konsensus politik tentang identitas nasional dan “aturan main” dasar, media nasional tidak mempromosikan berbunga tetapi menghancurkan transisi.

Mesir dan Tunisia, dua negara tempat para pemrotes menempatkan otokrat untuk penerbangan, adalah kasus dengan banyak cerita yang sama untuk diceritakan ketika datang ke media nasional. Sementara media Tunisia telah lama dikontrol dengan ketat dan Mesir relatif ribut, kedua negara telah melihat keterbatasan. pembukaan media itu berlangsung dalam dekade sebelum pemberontakan. Platform media baru berkembang ketika diktator yang sudah lama bercokol jatuh, tetapi kelangkaan sumber daya dan pengalaman membuat inisiatif baru di Mesir dan Tunisia terbuka untuk ditangkap oleh kepentingan kaya, gerakan politik, atau negara. Kegagalan untuk mereformasi media pemerintah

meninggalkan senjata ampuh yang dapat direbut oleh para elit lama untuk mempertahankan status mereka yang terancam.

Perlu dijelaskan secara singkat mengapa reformasi media terbukti begitu sulit. Di tengah polarisasi yang intens dan dengan aturan untuk diperebutkan, setiap pemain takut bahwa saingan politik yang dibenci akan dengan cepat menguasai "ketinggian komando" seperti sektor media yang tiba-tiba lebih bebas. Dalam permainan zero sum yang dimainkan tanpa aturan yang pasti di arena yang sangat terpolarisasi, setiap langkah menuju reformasi institusional ditafsirkan sebagai pembersihan politik yang bertujuan untuk merebut institusional secara permanen. Presiden Mesir yang baru terpilih Mohamed Morsi atau partai Ennahda Tunisia, misalnya, memiliki banyak alasan untuk mencari perubahan mendasar dalam lembaga-lembaga di jantung rezim lama, dari Kementerian Dalam Negeri hingga penyiaran negara, dan sebagian besar revolusioner akan setuju bahwa perubahan seperti itu penting.

Mesir selalu memiliki ruang publik yang lebih kuat dan kontroversial daripada rezim otoriter Arab lainnya yang dikontrol ketat. Rezim Mubarak terus mencengkram lembaga penyiaran dengan ketat sementara dinas intelijen memberlakukan garis merah tertentu, tetapi surat kabar Mesir menampilkan kritik reguler, kolumnis independen, dan jurnalis kritis. Jauh sebelum revolusi, media Mesir telah berevolusi menjadi campuran dinosaurus yang dikelola negara, surat kabar harian swasta yang disegani, dan tabloid garang, baru-baru ini bergabung dengan blog aktivis dan media sosial.

Ketika revolusi pecah saat 2011 menyingsing, sebagian besar media independen Mesir berkumpul di belakang protes. Stasiun televisi seperti ONTV menyelenggarakan acara bincang-bincang politik yang berpengaruh dan program yang mendorong agenda nasional. Pemandangan jendral-jendral papan atas yang ditampilkan di siaran langsung televisi tampak seperti tanda awal bahwa ruang publik klasik liberal demokratis akan terwujud. Begitu pula perdebatan sengit yang mulai muncul di media cetak ketika harian terkemuka membuka halaman mereka untuk berbagai penulis baru dan membiarkan batasan lama pada kritik politik turun.

Namun itu tidak akan bertahan lama. Kesatuan sesaat media pasca-revolusioner dengan cepat merosot menjadi lingkungan yang terpolarisasi, sensasional, dan beracun yang mendorong tren politik terburuk. Media yang dikelola negara sebagian besar tetap utuh dan dengan cepat melanjutkan kebiasaan lama. Mereka mematuhi ketika Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, yang memerintah Mesir dari Februari 2011 hingga pemilihan presiden Juni 2012, menolak untuk mengizinkan pengawasan serius terhadap militer. Penantang rezim lama datang untuk menyerang pers. Aktivis dan demonstran dianggap sebagai agen destabilisasi yang didukung asing dan disalahkan atas penyakit negara. Pada bulan Oktober 2011, pelaporan yang menyesatkan dan menghasut menyebabkan serangan berdarah terhadap protes yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Koptik di luar kantor penyiaran negara Mesir.

Ketika Morsi Ikhwanul Muslimin terpilih menjadi presiden pada Juni 2012, tidak ada penyelesaian apapun. Lembaga-lembaga negara memberontak pada prospek kekuasaan Islam; tidak muncul pilihan jalan transisi yang terpadu; Ikhwan gagal tanpa tujuan dalam upayanya untuk memaksakan ketertiban; dan masyarakat terpecah. Baik media yang dikelola pemerintah maupun swasta berkampanye melawan Ikhwanul Muslimin, menggabungkan ketakutan tentang ambisi Islam dengan liputan besar-besaran tentang kerusakan ekonomi dan sosial yang memicu ketidakpuasan rakyat. Gerai-gerai yang pernah dikenal mengkritik yang kuat mulai bertindak sebagai pembela negara keamanan yang dihidupkan kembali, sementara tokoh-tokoh konservatif yang dulu marjinal melonjak ke pusat ruang publik.

Setelah itu, rezim semakin menarik perhatian media. Wartawan dan pembawa acara televisi berlomba untuk melihat siapa yang paling antusias mengucapkan kalimat resmi. Perkemahan protes Ikhwanul Muslimin di Lapangan Rabaa Kairo diperlakukan sebagai penyebab alarm, sementara

perilaku pasukan keamanan dalam membantai lebih dari seratus orang di sana pada Agustus 2013 menarik liputan simpatik. Tokoh-tokoh yang telah mendukung revolusi dipaksa keluar dari siaran, dilecehkan, atau bahkan ditangkap dalam apa yang disebut oleh politisi liberal Amr Hamzawy sebagai waktu "neo-fasis" dalam sejarah media Mesir. Ahli bedah dan komik televisi Bassem Youssef, yang pertunjukan satirnya sangat efektif dalam menumbangkan kepresidenan Morsi, mendapati programnya dibatalkan hampir sebelum memulai musim pertamanya setelah kudeta.

Meskipun transisi Tunisia telah bernasib lebih baik daripada Mesir, media nasional di kedua negara telah mengikuti jalan yang sama. Eksperimen terbatas dengan penyiaran semi-independen meskipun, Tunisia media dikontrol lebih ketat daripada Mesir di bawah rezim lama. Setelah revolusi, jurnalis dan warga mengambil kesempatan untuk membangun sektor media yang nyata. Pada tahun 2011, undang-undang pers baru mengurangi pembatasan terburuk. Pada tahun 2012 muncul pembentukan badan pengawas baru di luar Kementerian Penerangan. Dan Konstitusi 2014 mencakup perlindungan yang kuat untuk kebebasan berbicara dan pers.

Reformasi ini berjalan lebih jauh dari apapun yang terlihat di Mesir, tetapi masih gagal. Pengawal lama terus mendominasi radio dan televisi nasional. Pemilik stasiun televisi swasta sering menggunakannya untuk mempromosikan profil pribadi dan agenda politik kesayangan mereka. Sementara itu, gerakan politik seperti Ennahda dan Nidaa Tounes (yang muncul sebagai saingan utama Ennahda) telah memperoleh stasiunnya sendiri. Seperti di Mesir, pertumbuhan media partisan telah mendorong publik untuk terpecah menjadi kubu yang saling bermusuhan dan tidak mengerti.

Transisi Tunisia hampir gagal pada pertengahan 2013 di tengah histeria politik yang dipicu media. Seperti di Mesir, media membantu mobilisasi ketidakpuasan terhadap pemerintah Islam terpilih. Pelaporan sensasional tentang hal-hal seperti pembunuhan oposisi Chokri Belaid pada Februari 2013, aktivitas Islamis di universitas, dan tuduhan korupsi Ennahda dan infiltrasi lembaga negara membangkitkan ketidakpercayaan dan kemarahan rakyat. Selama kampanye kepresidenan 2014, Presiden Moncef Marzouki yang marah mengecam media sebagai "sis-sis tidur dari partai lama" dan menyebut televisi pemerintah sebagai "media yang berbohong dan korup yang tidak memiliki hak untuk berbicara atas nama orang Tunisia."

Pengalaman Mesir dan Tunisia menunjukkan bagaimana sektor media nasional yang tidak direformasi dapat merusak transisi demokrasi. Di Yordania dan Maroko, dimana rezim kerajaan menggunakan reformasi sederhana untuk mencegah transisi, kontrol media langsung dan tidak langsung berfungsi untuk menggembarkan-gemborkan manfaat dari perubahan konstitusi terbatas sambil menjelek-jelekkan pengunjung rasa dan membangkitkan ketakutan akan kerusakan berdarah. Di negara-negara gagal yang penuh kekerasan seperti Libya dan Yaman, penyebaran stasiun televisi nasional dan lokal yang bersekutu dengan faksi-faksi politik tertentu berkontribusi pada polarisasi, ketakutan, dan ketidakamanan.

3) Media Sosial. Banyak yang berharap Facebook, Twitter, dan sejenisnya akan memberikan penangkal warisan beracun dari media resmi Arab, tetapi tidak ada hasil bahagia seperti itu yang datang. Platform baru telah membawa perubahan ke dunia media-Arab, tetapi tidak bisa lepas dari etiologinya—dan memang sering memperburuknya.

Media sosial jarang menyebabkan ketidakstabilan politik tanpa adanya keluhan atau kondisi struktural sebelumnya, tetapi media sosial bertindak sebagai akselerator dan penguat berbagai bentuk mobilisasi politik dan dapat memfasilitasi ledakan tiba-tiba dari pertikaian politik yang intens. Platform media sosial memberikan alat ketidakpuasan untuk mengorganisir gerakan, menyebarkan informasi, dan menghindari kontrol negara atas aliran berita dan ide. Media sosial, dengan kedekatan dan keintiman yang dimediasi, dapat menciptakan kemauan yang lebih besar untuk membantu tujuan bersama—mungkin dengan mengirimkan uang, atau bahkan dengan mengirim diri sendiri ke zona konflik.

Media Sosial dan Revolusi Timur Tengah

Revolusi di Timur Tengah tak lepas dari peran media sosial dan teknologi yang menyebabkan revolusi tersebut menjalar secara transnasional. Bagaimana media sosial berperan secara signifikan? Secara teoritik, media sosial adalah salah satu bentuk new media (media baru). Media baru tidak hanya berperan dalam penyebaran informasi, melainkan juga memungkinkan semua orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara dua arah.⁷ Secara umum, terdapat tiga elemen penting dari new media yang menyebabkan ia memiliki fungsi sosial, yaitu communication, convergence, dan content (3C). Berbeda dari media massa tradisional yang menggunakan hanya “satu bentuk” untuk semua orang, new media bersifat “satu untuk satu” dan konsekuensinya terfragmentasi pada kelompok-kelompok sosial tertentu, yang memiliki akses dan kapabilitas teknologi untuk menggunakannya.

Jejaring sosial selalu dilihat dari beragam konteks: sosiokultural, politik, dan lain-lain. Pada posisi kultural, jejaring sosial menjelaskan bagaimana seseorang merepresentasikan diri dan kelompoknya pada basis sosial. Secara politik, jejaring sosial bisa menjadi media artikulasi kepentingan yang lebih luas. Hal ini mengilustrasikan perkembangan media dari pencarian informasi menjadi keterkaitan antar-individu, yang menjadi salah satu variabel penting dalam membangun pengorganisasian serta gerakan sosial. Dalam konteks ini new media bisa digunakan sebagai alat menyampaikan sesuatu dan mengajak kepada perubahan.

Di beberapa negara Timur Tengah, walaupun anti-Barat, akses internet dibuka karena masyarakat sudah paham media dan teknologinya bisa dibeli. Konsekuensi dari daya beli teknologi yang semakin tinggi dan masyarakat yang semakin melek media ini adalah munculnya kelas menengah. Munculnya kelas menengah ini juga diiringi oleh perubahan struktur ekonomi politik di Timur Tengah, akibat Oil Boom di pertengahan tahun 1970 an, serta kebij akan pintu terbuka yang diberlakukan di Afrika Utara.

Di beberapa negara, misalnya Mesir dan Tunisia, kelas menengah tumbuh dan menjadi salah satu basis gerakan Islam yang cukup kuat (lihat Wickham, 2003; Zahid, 2010). Namun, ada dua masalah yang muncul. Pertama, beberapa negara tersebut adalah negara-negara yang secara politik berada di bawah kekuasaan rezim otoritarian, sehingga menghambat artikulasi politik kelas menengah. Kedua, kedua negara tersebut mengalami kondisi sosial-ekonomi yang sulit di pertengahan tahun 2010-2011, sebagai imbas langsung dari krisis ekonomi global. Pergerakan massa yang didominasi oleh kelas menengah, di Mesir dapat dilihat pada Gerakan 6 April atau Kifaya, merupakan respons dari krisis ekonomi domestik serta minimnya akses politik kelas menengah tersebut.

Menurut Faris Al-Fadh, masalah yang muncul di Timur Tengah adalah kebebasan masyarakat yang dibatasi secara politik dan direpresi oleh negara, sehingga rakyat menjadi tidak puas. Mesir dan Tunisia adalah dua contoh menarik dimana otoriterisme politik merepresi gerakan-gerakan oposisi, termasuk gerakan Islamis dan gerakan-gerakan sosial demokrasi. Di satu sisi, krisis membuat pergerakan tidak terhindarkan di awal tahun 2011. Di sisi lain, revolusi yang terjadi di kedua negara itu saat ini tak ada kaitannya dengan revolusi yang terjadi sebelumnya.

Di Mesir, revolusi yang terjadi pada tahun 2011 sangat berbeda, baik dengan gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh Ikhwanul Muslimin atau revolusi di tahun 1953. Proses revolusi Timur Tengah pada tahun 2011 dimulai oleh anak-anak muda yang tidak bersentuhan dengan ideologi. Mereka tidak berada dalam satu payung organisasi yang sama. Selain itu, revolusi juga didukung oleh penggunaan teknologi dan informasi yang menjadi simbol kelas menengah. Di Libya, menurut Faris, tidak adanya ruang publik menjadi pemicu utama dari tuntutan perubahan yang akhirnya berimplikasi pada gerakan massa menuntut mundurnya Moammar Khadhafi .

Di Timur Tengah, pengaturan terhadap alat komunikasi memang ada, tetapi akses informasi tidak akan tertutup karena sifatnya terdesentralisasi. Pada tahun-tahun revolusi, internet sangat terkait dengan isu-isu politik karena ia berhubungan dengan informasi yang punya nilai berita. Persoalannya, di Timur Tengah dan negara-negara lain dengan kultur otoritarian, internet tidak dapat diakses dengan cukup bebas. Dalam hal ini, aktivitas penyaluran informasi publik biasanya akan sangat terkait dengan isu keamanan nasional yang menjadi domain pihak militer untuk menuntaskannya.

Selain media sosial, revolusi di Timur Tengah juga menggunakan blog untuk menyalurkan pendapat politik. Blog menjadi sarana bagi kalangan muda Ikhwanul Muslimin Mesir untuk berekspresi, menjadi ruang swa kritik, berdiskusi dan berdialog dengan kelas menengah dan elite senior Ikhwan (Al- Anani, 2011; Hauslohner, 2011). Ada tiga tahap perkembangan blog sebagai sebuah media gerakan politik dalam konteks Ikhwanul Muslimin di Mesir (Al-Anani, 2011).

Pertama, tahap eksplorasi, yakni tahap ketika para blogger melakukan eksplorasi manhaj, aktivitas, agenda penting dan isu-isu internal organisasi melalui blog. Mereka tidak langsung secara frontal melakukan kritik terhadap rezim, melainkan dengan terlebih dulu melakukan eksplorasi isu dan wacana. Kedua, tahap resistensi sipil, yang muncul ketika revolusi terjadi. Blog pada fase ini menjadi simbol perlawanan politik melalui aktivitas propaganda. Tercatat sekitar 40 blogger yang awalnya mengawali perlawanan sipil melalui media maya di Mesir, sehingga blog mempunyai dimensi sosial-politiknya sendiri. Ketiga, swa kritik, yang terjadi setelah revolusi. Pada tahap ini para blogger mulai melakukan kritik ideologi, berdiskusi, berdebat akan hal-hal yang bersifat kritis.

Ketiga, blog tidak hanya menjadi media perlawanan sosial-politik, tetapi juga mengembangkan wacana demokratisasi yang lebih luas. Tahap terakhir ini kemudian bersesuaian dengan berkembangnya aktivisme transnasional di Timur Tengah. Gelombang demokratisasi muncul seiring dengan transnasionalisme dan pemanfaatan ruang publik sebagai bagian dari revolusi di kawasan ini.

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa ada hubungan antara proses demokratisasi dengan terbukanya ruang-ruang publik di Timur Tengah yang direpresentasikan oleh media-media baru. Dalam konteks ini, media baru menjadi pendorong proses demokratisasi yang berjalan secara perlahan-lahan. Keberadaan media menjadi penting ketika terjadi krisis ekonomi, yang pada gilirannya menjadi momentum bagi kaum oposisi untuk mengkonsolidasikan gerakannya.

5 Conclusion/Simpulan

Dari pemaparan diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa The Arab Spring yang bergejolak sejak awal 2011 lalu menjadi awal kebangkitan gerakan massa untuk menuntut adanya perubahan tatanan sosial politik. Peristiwa politik penting di negara-negara Arab tersebut terjadi karena banyak faktor yang terlibat memengaruhi, yaitu peran kelompok-kelompok intelektual, baik itu di Tunisia, Mesir, dan Suriah, serta pengaruh dari media sosial. Selain itu, efektifnya peran kedua faktor tersebut juga didukung dengan situasi sosial ekonomi dari ketiga negara tersebut yang mana dari data yang ditunjukkan di atas memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran dan buta huruf cukup tinggi. Hal lainnya yang terjadi dari ketiga negara tersebut adalah banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan negara (rezim).

Ketidakpuasan dalam kedua aspek di atas membuat gerakan massa di Timur Tengah menuntut suatu perubahan. Dari sisi sosial, rakyat jelas menginginkan kondisi yang lebih sejahtera, bila perlu dengan pergantian rezim. Dari sisi politik, rakyat mulai menginginkan sebuah upaya menuju tatanan demokrasi yang sering mereka lihat dan dengar di Barat, namun tidak mereka lihat di negeri sendiri. Semangat gerakan massa di Tunisia dan Mesir pun menyebar ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Kata kunci dalam penyebaran tersebut adalah aktivisme transnasional dan teknologi digital dalam konteks ruang publik. Aktivisme transnasional mengambil bentuk laporan yang terus-menerus dari

berbagai media mengenai apa yang tengah terjadi selama berbulan-bulan di Tunisia dan Mesir. Hal itu diikuti penyebaran ide-ide demokrasi dan penyuaan hak-hak rakyat melalui internet.

Dalam kasus revolusi di Timur Tengah ini terdapat suatu fenomena menarik, yaitu bahwa teknologi mulai memegang peranan penting dan rakyat, khususnya generasi muda, semakin pandai dalam memanfaatkan teknologi. Dengan masih terus berlangsungnya proses revolusi di Timur Tengah, masih banyak yang bisa diamati dari perkembangan peran pemuda dan teknologi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Satu catatan penting bisa ditarik dari proses ini: jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, yang baru muncul di abad ke-21, telah mengubah cara-cara perjuangan rakyat dalam dimensi yang lebih luas sebagai usaha pemenuhan hak-hak dalam konteks ruang publik, melalui cara-cara baru yang saat ini sulit dibendung oleh pihak mana pun.

References/Referensi

- Al-Anani, Khalil. (2008). *Brotherhood Bloggers: A New Generation Voices Dissent*. Arab Insight, 2 (1), 29-38
- Barakat, Halim, "Dunia Arab, Masyarakat, Budaya, dan Negara". Bandung: Nusa Media, 2012.
- Ghaddbian, Najib, "The New Asad: Dynamics of Continuity and Change in Syria". Source: Middle East Journal, Vol. 55, No. 4 (Autumn, 2001), pp. 624-641. Published by: Middle East Institute, 2001.
- Hauslohner, Abigail. 18 April 2011. *Democracy, Egyptian Style*. Time
- Khalil, Ashraf, "February 3: Swords VS. Pen. Dalam buku Revolution In The Arab World". Washington: Foreign Policy, 2011. Tamburaka, Apriadi, "Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah". Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2011.
- Lynch, March. (2015) "After The Arab Spring How The Media Trashed The Transitions", Journal of Democracy Vol. 26 Number 4.
- Pito, Toni Andrianus, dkk., "Mengenal Teori-Teori Politik. Dari Sistem Politik sampai Korupsi". Bandung: Penerbit Nuansa, 2006.
- Rizky, Ahmad Mardhatillah Umar. dkk, (2014). "Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena "Arab Spring" dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional". Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik. Vol 18 No. 2.
- Sahide, Ahmad. dkk, (2016). "The Arab Spring : Membaca Kronologi Dan Faktor Penyebabnya". Jurnal Hubungan Internasional. Vol 4 no. 2.
- Said, Edward. W., "Peran Intelektual". Jakarta: Obor, 2014.
- Salim, Agus, "Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Metodologi Kasus Indonesia". Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Sau, Ranjit, "Democracy and Reform: Voices in West Asia". Sumber: Economic and Political Weekly, Vol. 39, No. 38 (Sep. 18-24, 2004), pp. 4232-4234.
- Syukur, Yanuardi, "Presiden Mursi, Kisah Ketakutan Dunia pada Kekuatan Ikhwanul Muslimin". Yogyakarta: Hayyun Media, 2013.
- Wilardjo, L., "Kekuatan Pengimbang". Kompas, edisi 13 September 2014. Kolom opini.
- Wickham, Carrie Rosefsky. (2003). *Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt*. New York: Columbia University Press.

Zahid, Muhammad. (2010). *The Muslim Brotherhood and Egypt's Succession Crisis: The Politics of Liberalisation and Reform in the Middle East*. London: IB Tauris.